



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 973/416/BAPENDA/2019  
**Tanggal** : 27/06/2019

**No. Koreksi** : 385

**Instansi** : Badan Pendapatan Daerah Kota Palu  
**Tentang** : Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Pajak Daerah Triwulan II tahun 2019

**PETUGAS**

**Rosmawati**

**PENERIMA**

**Mirfan**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RNIM 27/06/1910:20



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PUNGUTAN PAJAK DAERAH  
TRIWULAN II TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Pajak Daerah Triwulan II Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010



PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM

SKPD  
PEMRAKARSA

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 26);

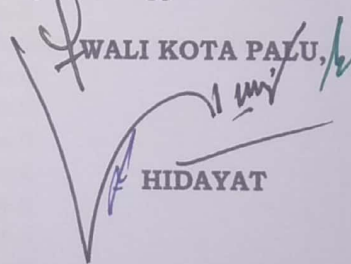
PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Pajak Daerah Triwulan II Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
  - Pejabat dan Pengawai Badan Pendapatan Daerah Kota Palu sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

  
WALI KOTA PALU,  
HIDAYAT

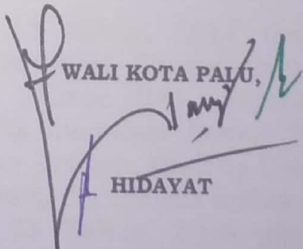
PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PUNGUTAN  
PAJAK DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi
1	2	3
1	Drs. Hidayat, M.Si	Wali Kota Palu
2	Sigit Purnomo Said	Wakil Wali Kota Palu
3	Asri, SH	Sekretaris Daerah Kota Palu
4	DR. Farid Rifai, M.Si	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
5	Drs. Tamin Tombolotutu	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
6	Susy Syamsul Bachry, SH., M.Si	Kepala Bidang Pendapatan I
7	Mursidin Hi. Yusuf, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Pendapatan II
8	Hj. Rosna, SH, M.AP	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
9	Drs. Firdaus	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
10	Andi Namirah	Staf Golongan II
11	Sabir	Staf Golongan II
12	Masrin	Staf Golongan I
13	Djariati Suhong, SE	Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan
14	Rini Pratiwi, SE	Staf Golongan III
15	Hamsia Yusup, S.Si	Staf Golongan III
16	Andi Nur Afni, A.Md	Staf Golongan II
17	Abd. Rahman, A.Md	Staf Golongan II
18	Lisdawati	Staf Golongan II
19	Andi Irawan	Staf Golongan II
20	Rosmaeni Rachmad, SE, MM	Kasub. Bid. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah
21	Deivy Cristalina, SE	Staf Golongan III
22	Zahra Abd.Muis, A.Md	Staf Golongan III
23	Ritha, S.Sos	Staf Golongan III
24	Sulaeman, S.Sos	Staf Golongan III
25	Achdiat Magu Datu, A.Md	Staf Golongan II
26	Makruf	Staf Golongan II
27	Anton	Staf Golongan II
28	Mohammad Fadly, SE, M.Adm.KP	Kasub. Bid. Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah
29	Syamsiar, S.Si	Staf Golongan III
30	Mohammad Ali, SE	Staf Golongan III
31	Ade Mariani, A.Md	Staf Golongan III
32	Burhan	Staf Golongan II
33	Herson Bayu Samudra, A.Md	Staf Golongan II
34	Mulianti	Staf Golongan II
35	Windu Rahayu	Staf Golongan II
36	Daeng Talara	Staf Golongan II
37	Endang, SE	Kasub. Bid. Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah
38	Samiri Masinona, S.Sos	Staf Golongan III
39	Raihan Farras, S.STP	Staf Golongan III
40	Moh. Ichsan, SE	Staf Golongan III
41	Lili Herawati, A.Md	Staf Golongan II
42	Sarfin Marbi	Staf Golongan II
43	Moh. Nawir	Staf Golongan II
44	Siti Aminah	Staf Golongan II
45	Nurmas Rahim	Staf Golongan II
46	Saleh Yusuf	Staf Golongan II
47	Sopian Supu	Staf Golongan II

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

48	Murjiyato Kayo, BSc	Kasub. Bid. Penagihan dan Pembukuan PBB & BPHTB
49	Fadil Sukri, SE., MM	Staf Golongan III
50	Rhany Meydi Putri, SE	Staf Golongan III
51	Rada Megawati, SE	Staf Golongan III
52	Deiby Frida, SE	Staf Golongan III
53	Sri Wahyuni, SE	Staf Golongan III
54	Berta, S.Si	Staf Golongan III
55	Aminah Hanapi Buloe	Staf Golongan III
56	Anna	Staf Golongan I
57	Moh. Mirza Lesnusa, S.Sos, M.Si	Kasub. Bid. Pengolah Data dan Informasi PBB & BPHTB
58	Mohamad Fahri	Staf Golongan II
59	Agung Wahyudi, SE	Kasub. Bid. Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB
60	Siti Zachra, S.Sos	Staf Golongan III
61	Kelly John Kennedy, ST	Staf Golongan III
62	Fathurrahman, SE	Staf Golongan III
63	A.M Tanrawali	Staf Golongan II
64	Dedy Sakti	Staf Golongan II
65	Musrifa I Palarante	Staf Golongan II
66	Munifa, S.Sos	Staf Golongan III
67	Hersanto	Staf Golongan II
68	Indra Jaya	Staf Golongan I
69	Naim	Staf Golongan II
70	Nurdin	Staf Golongan III
71	Mohammad Adnan, S.Sos	Staf Golongan III
72	Fanky Rahmad	Staf Golongan II
73	Sukma Safrianto, SH	Kepala UPT Pendapatan Wilayah I
74	Mustaan	Staf Golongan II
75	Deisi Silvana Russen, SH	Kepala UPT Pendapatan Wilayah II
76	Adriana	Staf Golongan II
77	Esna	Staf Golongan II
78	Abd. Hafid, S.Sos	Kepala UPT Pendapatan Wilayah III
79	Faharudin	Staf Golongan II
80	Dandi Dwi Nugroho	Staf Golongan II
81	Said Adam, SH	Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV
82	Kisman. AL	Staf Golongan III
83	Nilam Zurma, S.Sos	Staf Golongan III
84	Amir	Staf Golongan II

  
 WALI KOTA PALU,  
 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	